

## **“Menelaah Kelangkaan Gas Elpiji3kg “krisis atau permainan politik?”**

<sup>1</sup>Amar farid, <sup>2</sup>Rizal Al hamid, <sup>3</sup>Muhammad Rif'at Syauqi

<sup>1)2)3)</sup>UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Email: <sup>1)</sup> [22105010079@student.uin-suka.ac.id](mailto:22105010079@student.uin-suka.ac.id)

Email: <sup>2)</sup> [rizal.alhamid@uin-suka.ac.id](mailto:rizal.alhamid@uin-suka.ac.id)

Email: <sup>3)</sup> [22105010084@student.uin-suka.ac.id](mailto:22105010084@student.uin-suka.ac.id)

### **ABSTRAK**

Kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2025 menimbulkan kontroversi dan keresahan di tengah masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji apakah kelangkaan LPG 3 kg merupakan murni krisis distribusi atau bagian dari dinamika politik dalam pengelolaan subsidi energi. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap kebijakan distribusi LPG 3 kg, mekanisme penyaluran, serta respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Data dianalisis melalui kajian dokumen kebijakan, pemberitaan media, dan wacana publik untuk memahami dampak sosial yang ditimbulkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini berdampak signifikan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada LPG subsidi untuk kebutuhan sehari-hari. Terbatasnya akses terhadap LPG meningkatkan biaya operasional, menurunkan produktivitas, dan memperbesar kerentanan ekonomi. Selain itu, distribusi yang tidak merata serta kurangnya sosialisasi kebijakan turut memperparah kebingungan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kesimpulannya, kelangkaan LPG 3 kg menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan distribusi LPG agar lebih adil, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat rentan.

**Kata Kunci:** Krisis, Kelangkaan, Elpiji3kg, Politik

### ***"Investigating the 3kg LPG Gas Shortage: A Crisis or a Political Maneuver?"***

### **ABSTRACT**

*The shortage of 3kg LPG gas that occurred in Indonesia in early 2025 sparked widespread controversy and public concern. This article aims to examine whether the 3kg LPG gas shortage represents a genuine distribution crisis or is influenced by broader political dynamics surrounding subsidy regulation. The study employs a qualitative approach by analyzing government policies, distribution mechanisms, and public responses related to the 3kg LPG gas program. Data are interpreted through policy documents, media reports, and public discourse to understand the social impact of the regulation. The analysis indicates that the policy has had a significant adverse effect on lower-income communities, particularly low-income households and micro-entrepreneurs such as small food vendors who depend heavily on subsidized LPG for their daily livelihoods. Limited access to gas has increased operational costs, reduced productivity, and heightened economic vulnerability among these groups. Furthermore, uneven distribution and lack of adequate communication have contributed to public confusion and distrust toward the government. In conclusion, the 3kg LPG gas shortage highlights the urgent need for a comprehensive evaluation of the distribution policy. Ensuring fairness, efficiency, and social sensitivity in policy implementation is crucial to prevent similar crises and to protect the welfare of vulnerable communities.*

**Keywords:** Crisis, Scarcity, 3kg LPG, Politics

## **PENDAHULUAN**

Kelangkaan gas melon bukan merupakan hal baru. Masalah ini terus berulang dari tahun ke tahun tanpa adanya solusi yang jelas. Isu mengenai kelangkaan gas elpiji 3 kilo gram, yang lebih dikenal dengan sebutan gas melon, sudah sangat familiar bagi masyarakat Indonesia. Hampir setiap tahun, permasalahan ini kembali mencuat, namun hingga saat ini belum ada langkah penyelesaian yang benar-benar menysasar akar persoalan. Meskipun pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), menyatakan bahwa pasokan gas dalam keadaan aman, kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. (Umam dkk., 2020)

Pernyataan pemerintah yang menyebut pasokan gas dalam kondisi aman seolah tak selaras dengan realitas di lapangan. Warga tetap kesulitan mengakses gas melon di tengah kebutuhan yang tinggi. warga nyatanya masih terus terdesak dan berjuang mati-matian untuk mendapatkan suplai energi pokok ini. kondisi ini memaksa masyarakat untuk berjuang keras demi memperoleh energi rumah tangga yang seharusnya mudah diakses, bahkan untuk kebutuhan dasar sekalipun. (Putra dkk., 2024)

Kondisi ini semakin diperparah oleh kebijakan Menteri ESDM RI yang mencuat per 1 Februari 2025 lalu. situasi kian pelik sejak diterapkannya kebijakan baru oleh Menteri ESDM pada 1 Februari 2025, yang justru menimbulkan reaksi keras dari publik. kebijakan tersebut mengatur tentang pengetatan distribusi gas bersubsidi dan melarang penjualannya secara

eceran di warung non-pangkalan resmi. aturan ini membatasi distribusi gas melon hanya melalui pangkalan resmi, sekaligus melarang warung-warung kecil untuk menjualnya secara eceran, dengan alasan subsidi harus lebih tepat sasaran. (KHAIRUNNISA & Rosidah, 2023)

Dalih pemerintah, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, tetapi dampaknya justru terbukti semakin menyulitkan warga. alih-alih menyelesaikan persoalan, kebijakan ini justru memperburuk kondisi. Antrean panjang dan langkanya gas menjadi pemandangan sehari-hari, terutama di daerah padat penduduk. bahkan, para warga harus mengantre berjam-jam karena kelangkaan gas ini. fenomena warga yang rela menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu tabung gas menjadi bukti bahwa sistem distribusi saat ini tidak berjalan optimal. (KHAIRUNNISA & Rosidah, 2023)

Sejumlah pengamat menilai bahwa persoalan utama dari kelangkaan ini bukan terletak pada pasokan, melainkan pada tata kelola distribusi dan pengawasan yang lemah. Menurut banyak pengamat, sumber masalah bukan pada jumlah pasokan, melainkan pada lemahnya sistem distribusi dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengungkapkan bahwa kebocoran distribusi adalah masalah utama dalam subsidi gas melon. Dalam pandangan Mamit Setiawan dari Energy Watch, kebocoran distribusi menjadi penyebab utama kegagalan

kebijakan subsidi gas melon selama ini. (Mukhalladun, 2022)

Banyak oknum yang diduga menimbun gas untuk mendapatkan keuntungan besar saat harga naik. Praktik penimbunan oleh oknum tertentu kerap menjadi taktik mencari keuntungan pribadi, memanfaatkan ketidaktegasan pengawasan saat harga mulai melonjak. Dalam kondisi ini, pemerintah seharusnya segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan gas melon. Sudah saatnya pemerintah bertindak lebih cepat dan tegas. Langkah konkret perlu segera diambil untuk menjawab keresahan masyarakat. (Hidayat dkk., 2011)

Evaluasi kebijakan distribusi, peningkatan pengawasan, serta transparansi dalam penyaluran subsidi menjadi hal yang mendesak. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, pembenahan pengawasan distribusi, serta transparansi dalam penyaluran subsidi harus menjadi prioritas utama pemerintah saat ini. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dalam memenuhi kebutuhan energi mereka, tanpa harus dihadapkan pada kebijakan yang justru menyulitkan. Energi adalah hak dasar warga negara. Maka, sudah menjadi kewajiban negara untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tidak menambah beban masyarakat, melainkan memberi rasa aman dan kepastian. (Sirait & Leorince, 2024)

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM) bersama dengan Pertamina, telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini. Salah satu langkah yang diambil adalah revisi kebijakan distribusi, penetapan regulasi baru, serta upaya pengawasan ketat terhadap peredaran gas elpiji di pasar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi gas elpiji 3kg tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. (Kurniawan, 2013)

Namun, meskipun langkah-langkah tersebut diambil, masalah kelangkaan gas elpiji 3kg masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi secara komprehensif. Penetapan kebijakan dan keputusan pemerintah diharapkan dapat mengurangi dampak kelangkaan ini, memastikan pasokan yang cukup, serta mengatur harga yang wajar agar masyarakat dapat terus mengakses bahan bakar tersebut tanpa beban ekonomi yang lebih berat. (Rahmadian dkk., 2025)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Fokus penelitian adalah menganalisis fenomena kelangkaan gas elpiji 3kg dari perspektif distribusi kebijakan dan potensi intervensi politik. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara:

1. **Studi Dokumentasi:** Mengkaji kebijakan-kebijakan resmi dari Kementerian ESDM, Pertamina, dan peraturan terkait distribusi gas elpiji bersubsidi.

2. **Analisis Media:** Menelusuri pemberitaan dari media nasional dan lokal terkait kelangkaan gas elpiji 3kg, terutama sejak diterbitkannya kebijakan larangan penjualan eceran per 1 Februari 2025.
3. **Wawancara Semi-Struktural** (*jika memungkinkan dilakukan*): Dengan pelaku usaha mikro, warga terdampak, dan pengamat energi guna menggali pandangan langsung mengenai dampak dan persepsi terhadap kebijakan distribusi elpiji 3kg.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (konten analisis) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan narasi utama yang berkembang di masyarakat serta keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah dan kemungkinan kepentingan politik.

#### **Literatur review**

Studi oleh Pradiptyo dkk. (2015) dalam tulisan beliau menunjukkan bahwa program subsidi energi, termasuk LPG 3kg, yang dilakukan oleh pemerintah sering kali tidak tepat sasaran dan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas.

Penelitian oleh Energy Watch Indonesia yang mengidentifikasi adanya kelemahan dalam pengawasan distribusi sebagai sumber utama kebocoran LPG 3kg, hal ini tidak lain termasuk praktik penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Aspinall dan Mietzner (2019), Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia: The

Political Economy of Democratic Inequality. NUS Press. menurutnya distribusi subsidi energi kerap digunakan sebagai alat politik untuk meraih simpati publik, terutama menjelang pemilu.

Penelitian oleh Wahyuni (2021) *Dampak Sosial Ekonomi Krisis Energi terhadap Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, menjelaskan bahwa kelangkaan energi seperti LPG menyebabkan beban ekonomi tinggi pada rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro.

Penelitian oleh LPEM FEB UI (2022). *Evaluasi Efektivitas Distribusi LPG 3kg di Indonesia*. menyoroti adanya gap antara data pasokan gas oleh pemerintah dan realita di masyarakat yang mengalami kelangkaan, yang menandakan adanya masalah dalam rantai distribusi.

Studi oleh Nurrahmi dan Siregar (2022) *Analisis Kebijakan Pembatasan Distribusi LPG 3kg di Indonesia: Studi Kasus di Pulau Jawa dan Sumatera*. Jurnal Administrasi Publik, menyoroti bahwa pembatasan distribusi melalui pangkalan resmi mengurangi efisiensi akses masyarakat, khususnya di daerah terpencil.

#### **Kebijakan pemerintah tentang elpiji3kg**

Kelangkaan gas elpiji 3kg di Indonesia menjadi isu yang semakin mendesak di tahun 2025 ini. Gas elpiji 3kg, yang merupakan bahan bakar yang sangat penting bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), telah menjadi pilihan utama dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, kelangkaan gas elpiji3kg semakin

terasa di berbagai daerah, mengakibatkan kesulitan bagi banyak masyarakat untuk mendapatkan pasokan yang cukup. Masalah ini pun berimbas pada harga yang melonjak tinggi, yang tentu saja hal ini sangat membebani ekonomi masyarakat, terutama kalangan bawah. (Akmal, 2025)

Indonesia memiliki potensi besar dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya karena kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Aturan mengenai pengelolaan kekayaan alam tersebut diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ayat 3 pasal tersebut ditegaskan bahwa "Bumi, air, dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berhak atas sumber daya alam tersebut, tetapi juga berkewajiban untuk mengelolanya secara adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas. (Wibawa, 2019)

Dilansir dari tempo.com, mulai 1 Februari 2025 gas elpiji 3kg tidak lagi dijual eceran. Masyarakat harus membeli gas tersebut hanya di pangkalan resmi Pertamina dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan. Kebijakan ini ditetapkan agar elpiji 3kg didistribusikan tepat sasaran. Kebijakan ini sebenarnya memiliki tujuan yang baik, namun pada realisasinya justru malah menambah masalah baru bagi UMKM lokal dan masyarakat yang ada di Indonesia.

Pada dasarnya penjualan minyak bumi ini tidak boleh bebas diperjual belikan, dimana ini kembali pada teori pasar *monopoly*. Pasar *Monopoly* adalah situasi yang mana hanya terdapat satu penjual pada suatu komoditas, dimana penjual atau produsen ini sama sekali tidak memiliki pesaing. Namun, pada kasus ini dimana yang seharusnya elpiji 3kg ini jika diberlakukan kebijakan ini seharusnya menjadi solusi dimana pemerintah bisa mengendalikan perdagangan minyak bumi sebaliknya ini malah menimbulkan masalah. Namun sesuai dengan hukum pasar *monopoly*, dimana tidak ada barang pengganti hal ini membuat masyarakat tidak mempunyai pilihan lain selain mengantri di pangkalan resmi Pertamina. (Ayuni, 2024)

Bisa dilihat dari ciri-ciri pasar *monopoly*:

1. Tidak banyak penjual atau barang komplementer
2. Bisa menaikkan dan menurunkan harga sesuai dengan keinginan penjual karena tidak banyak pesaing.
3. Diatur oleh kebijakan pemerintah. Pada fase dalam Pasar Persaingan Sempurna menurut Mankiw, pasar persaingan sempurna dianggap sebagai model ideal karena menghasilkan efisiensi alokatif (*allocative efficiency*) dan efisiensi produktif (*productive efficiency*):

Efisiensi Alokatif: Barang diproduksi pada jumlah yang diinginkan oleh konsumen, di mana harga sama dengan biaya marginal produksi ( $P = MC$ ). Efisiensi Produktif: Barang diproduksi dengan biaya paling rendah, karena perusahaan

dalam pasar ini beroperasi pada skala biaya minimum.(Ayuni, 2024)

Berita kenaikan harga elpiji atau kelangkaan pasokan elpiji. Hal ini dapat dianalisis sebagai berikut:

#### 1. Permintaan Elpiji

Permintaan Inelastis: Elpiji adalah kebutuhan pokok untuk memasak di banyak rumah tangga. Konsumen sulit mengurangi konsumsi meskipun harga naik, sehingga permintaan relatif inelastis. Jika terjadi kenaikan harga elpiji, dampaknya pada permintaan mungkin kecil, tetapi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah akan sangat terdampak, terutama untuk elpiji bersubsidi.

#### 2. Penawaran Elpiji

Kelangkaan Pasokan: Jika berita menginformasikan kelangkaan elpiji di pasar, ini dapat disebabkan oleh: Gangguan distribusi, Produksi yang tidak mencukupi, Kebijakan pemerintah, seperti pengurangan subsidi atau pembatasan distribusi.

Kenaikan Harga Produksi: Misalnya, harga bahan bakar atau biaya transportasi meningkat, yang memengaruhi biaya produksi dan distribusi elpiji. Ini dapat mendorong kenaikan harga di pasar.

Kebijakan pemerintah untuk menjual gas elpiji 3kg hanya di pangkalan resmi Pertamina dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) bertujuan untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran. Namun, kebijakan ini menciptakan tantangan baru, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM yang bergantung pada LPG sebagai kebutuhan utama.(Ayuni, 2024)

### **Penyebab kelangkaan gas elpiji3kg**

Kelangkaan elpiji 3 kg kali ini ternyata tidak lepas dari kebijakan pemerintah, yang mengeluarkan putusan untuk membatasi atau memangkas kuota elpiji3kg. Pemerintah disebut telah memangkas kuota elpiji bersubsidi untuk tahun 2025. Hal itu diungkapkan anggota Komisi XII DPR Nevi Zuairina menanggapi kelangkaan gas elpiji pada Senin (3/2/2025) seperti dimuat dalam Tribunnews.com. (Nevi Zuairina2025)

Menurutnya, Pemerintah tidak bisa sekedar membantah adanya kelangkaan, tetapi harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Penyebab utama dari kelangkaan gas elpiji ini adalah penetapan kuota elpiji bersubsidi untuk tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya. Yaitu Pada tahun 2024, lanjut Nevi, distribusi elpiji 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota tahun ini hanya sebesar 407.555 metrik ton. Pemerintah memang mengklaim adanya kenaikan kuota dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton atau naik 2,1 persen dibanding tahun lalu, namun angka ini tetap lebih kecil dibandingkan realisasi tahun sebelumnya."Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan energi yang terus meningkat, kebijakan ini berisiko memperburuk kelangkaan di banyak daerah," kata Nevi.

### **Dampak dari kelangkaan elpiji3kg**

Kelangkaan gas elpiji 3 kg membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bagi kalangan

rumah tangga miskin, gas elpiji 3 kg adalah sumber energi yang paling terjangkau dan banyak digunakan untuk kebutuhan memasak. Ketika pasokan terbatas, banyak keluarga yang harus mencari alternatif bahan bakar lain yang lebih mahal, seperti minyak tanah atau bahkan kompor listrik, yang jauh lebih mahal dan tidak dapat diakses oleh semua orang. munculnya kelangkaan gas elpiji 3 kg juga berdampak pada UMKM, terutama pedagang kecil yang menggantungkan usaha mereka pada gas elpiji. Misalnya, pedagang warung makan dan restoran kecil yang menggunakan gas elpiji untuk memasak. Jika mereka tidak bisa mendapatkan gas elpiji dengan harga yang wajar, mereka akan terpaksa menaikkan harga jual produk mereka, yang akhirnya mempengaruhi daya beli konsumen. (LAMBANG, t.t.)

Di tingkat makro, kelangkaan gas elpiji 3 kg juga berdampak pada inflasi, karena harga barang dan jasa yang menggunakan gas sebagai bahan bakar utama menjadi lebih mahal. Hal ini mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, terutama bagi mereka yang berada di kelompok ekonomi bawah. Selain itu penting untuk dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan energi yang efisien dan bijak. Pemerintah dan lembaga terkait bisa memberikan pelatihan atau sosialisasi mengenai penggunaan energi yang lebih hemat dan berkelanjutan. Upaya-upaya ini tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan pada gas elpiji, tetapi juga membantu masyarakat untuk lebih

mandiri dalam menghadapi perubahan kondisi pasar energi. (Latif, 2015)

Kelangkaan gas elpiji 3 kg bersubsidi merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait. Penyebab kelangkaan ini bervariasi, mulai dari pengurangan kuota subsidi, perubahan kebijakan distribusi, hingga disparitas harga dengan gas non-subsidi. Dampaknya sangat terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Oleh karena itu, penyesuaian kuota, pengawasan distribusi yang lebih ketat, dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah-langkah penting yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini. Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan kelangkaan gas elpiji 3 kg dapat segera teratasi dan kebutuhan masyarakat akan energi dapat terpenuhi dengan lebih baik. (pajak.com 2025)

### **Dimensi publik dan politik**

Kelangkaan gas elpiji 3 kilo gram memicu gelombang protes dari masyarakat. Kejadian ini kembali memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah kerap dibuat tanpa kajian mendalam dan kurang mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Gas elpiji 3kg merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga pembatasan distribusinya secara alami menimbulkan keresahan dan kritik publik. Dampak dari kelangkaan ini sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat kecil. Lebih tragis lagi, ketika situasi memanas, pemerintah justru tampil seolah-olah sebagai penyelamat. Setelah

amarah publik memuncak, barulah terungkap bahwa kebijakan tersebut merupakan inisiatif dari menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, bukan arahan langsung dari Presiden Prabowo seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Sufini Dasco.

Masalah utamanya bukan semata-mata tentang siapa yang harus memikul tanggung jawab, melainkan bagaimana mungkin sebuah kebijakan dilahirkan tanpa perencanaan dan analisis yang matang. Lebih dari itu, patut dipertanyakan pula mengapa Presiden seolah membiarkan para menterinya mengambil langkah-langkah strategis tanpa landasan riset yang memadai. Yang lebih memprihatinkan, pola seperti ini tampaknya terus berulang dalam siklus pemerintahan. Dalam beberapa waktu terakhir, terlihat adanya kecenderungan yang sama setiap kali pemerintah—melalui salah satu pejabatnya, seperti seorang menteri—mengumumkan kebijakan yang menimbulkan kontroversi publik. Umumnya, kebijakan tersebut disusun tanpa dukungan data yang solid, kurang dalam kajian mendalam, serta minim pelibatan pihak-pihak yang terdampak langsung. Alhasil, keputusan tersebut sering kali memicu penolakan luas dari masyarakat. (Jihan Adila Rahmi 2025)

Kelangkaan dari gas elpiji 3kg yang terjadi sejak awal Februari 2025 memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat: apakah ini murni krisis distribusi atau ada unsur politik di baliknya? Kebijakan pemerintah yang melarang penjualan gas elpiji 3kg di pengecer sejak 1 Februari 2025, dan mewajibkan pembelian melalui pangkalan resmi dengan pencatatan

Nomor Induk Kependudukan (NIK), menuai protes dari berbagai pihak. (Pramestya Kinanti Nurimastuti 2025)

Anggota MPR RI, Al Hidayat Samsu, menyatakan bahwa kebijakan ini tergesa-gesa dan tidak fokus dalam meninjau distribusi kebutuhan pokok masyarakat, penting untuk mempertimbangkan kesiapan sistem serta kemudahan akses bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu peristiwa yang mencerminkan krisis ini terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan, ketika seorang ibu rumah tangga meninggal dunia karena kelelahan setelah mengantre berjam-jam demi memperoleh gas elpiji 3 kg yang semakin langka. Menurut Al Hidayat Samsu, memasuki tahun 2025, kondisi masyarakat kecil sudah sangat tertekan oleh berbagai beban ekonomi. Hal ini terlihat dari meningkatnya harga barang pokok, berkurangnya subsidi pemerintah, serta kebijakan energi yang justru memperparah beban hidup warga kurang mampu. (Agustin dkk., 2022)

“Kejadian memilukan ini adalah alarm keras bagi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan distribusi dan akses masyarakat kecil terhadap kebutuhan pokok mereka,” ucap tegas anggota DPD dapil Sulawesi Selatan ini. “Kami mendesak pemerintah untuk segera bertanggung jawab dan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan krisis ini. Jangan sampai rakyat kembali menjadi korban atas keputusan yang tidak matang dan minim perencanaan,” ujarnya. (Al Hidayat Samsu, 2025)



Fahmy Radhi, peneliti senior dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, menganggap bahwa kebijakan ini kurang masuk akal karena para pengecer kecil tidak memiliki kemampuan finansial untuk bertransformasi menjadi agen resmi. Ia mengusulkan agar pemerintah segera melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan tersebut, serta membenahi sistem distribusi dan mekanisme pengawasan harga guna mencegah tekanan berlebih terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan menjaga kestabilan ekonomi nasional. Menurut Fahmy, kebijakan ini tidak hanya berpotensi menambah beban bagi kalangan miskin, tetapi juga dapat mengancam kelangsungan usaha mikro dan kecil yang selama ini mengandalkan penjualan gas elpiji 3 kilogram sebagai sumber penghasilan utama. (Maulidia, 2025)

Ia menyampaikan bahwa banyak pedagang kecil menjual gas dengan harga di atas tarif resmi, namun tetap diminati masyarakat karena lokasinya yang lebih dekat dan kemudahan akses. Bahkan, dalam beberapa situasi, harga yang ditawarkan sedikit lebih tinggi disertai layanan yang lebih fleksibel. “Jika aturan ini tetap dijalankan, usaha mikro bisa terancam gulung tikar dan masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin terbebani. Kenaikan harga gas tentu akan berdampak langsung pada konsumen,” ujarnya. Di samping itu, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan kendala dalam distribusi karena sistem yang lebih terpusat menjadi rawan gangguan pasokan, sementara jumlah pangkalan yang tersedia belum mampu

mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah. (Fahmy Radhi, 2025)

Di sisi lain juga, Ketua badan anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, menyoroti bahwa alokasi anggaran subsidi elpiji 3kg dalam APBN 2025 sebesar Rp87,6 triliun seharusnya mencukupi. Namun, ia mensinyalir bahwa kelangkaan LPG 3 kg di tengah masyarakat disebabkan oleh distribusi yang masih terbuka dan praktik penyimpangan seperti penimbunan dan pengoplosan. (Said Abdullah, 2025)

Ketua badan anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti langkanya tabung gas elpiji 3kg di tengah tengah masyarakat. Menurutnya, dalam APBN 2025, anggaran untuk elpiji 3kg sudah dinaikan dari tahun 2024 guna menjamin pelaksanaan subsidi. “Pada APBN 2025, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah telah menyepakati alokasi subsidi elpiji 3kg sebesar Rp87,6 triliun, lebih tinggi dari tahun pagu tahun 2024 sebesar Rp85,6 triliun. Volume subsidi gas elpiji 3kg tahun 2025 sebesar 8,17 juta ton,” kata Said dalam keterangannya pada Parleментарia, di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Namun demikian, Said mensinyalir kelangkaan elpiji 3kg di tengah masyarakat dikarenakan elpiji 3kg ialah barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, akan tetapi diperdagangkan secara umum terbuka. “Banggar DPR mencermati evaluasi penyaluran subsidi elpiji 3kg yang disampaikan oleh pemerintah. Konsumsi elpiji Tabung gas 3kg mengalami peningkatan dengan rata-rata

pertumbuhan volume di tahun 2019-2022 sebesar 4,34 persen dengan distribusi masih terbuka,” katanya. (Said Abdullah, 2025)

Kondisi ini menimbulkan spekulasi bahwa kelangkaan gas elpiji 3kg bukan semata-mata disebabkan oleh faktor teknis, melainkan ada unsur politik di baliknya. Beberapa pihak menilai Pemerintah kerap membuat kebijakan tanpa riset yang memadai dan kurang mempertimbangkan kondisi nyata dalam kehidupan masyarakat, lalu tampil seolah-olah menjadi penyelamat saat situasi sudah mulai kacau. Padahal, kebijakan publik seharusnya berpijak pada realitas sosial dan didukung oleh riset mendalam. Tanpa hal itu, konsekuensi sosial yang ditimbulkan bisa sangat berat. (DR. Anggito Abimanyu, 2025)

3. Pertama, pola politik seperti ini bisa mendorong masyarakat menjauh dari dunia politik. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem politik makin terkikis. Saat kebijakan dibuat tanpa pertimbangan matang dan hanya demi pencitraan, masyarakat merasa kepentingannya diabaikan. Mereka melihat kebijakan sebagai alat kekuasaan, bukan solusi. Akibatnya, minat untuk terlibat dalam politik menurun, sikap apatis tumbuh, dan demokrasi menjadi formalitas tanpa makna nyata.
4. Kedua, pendekatan politik yang mengedepankan citra “pahlawan” dalam kebijakan yang kurang terencana justru memperkuat budaya patronase. Dalam

sistem ini, pemimpin tidak dipandang sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab atas kebijakan sejak awal, melainkan sebagai sosok yang datang sebagai “penyelamat” setelah kebijakan yang gagal memicu protes dari masyarakat.

5. Dampak yang paling signifikan adalah hilangnya hak ekonomi masyarakat, yang akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka. Apabila pola ini terus berlanjut, pemerintah akan kehilangan kepercayaan publik, sementara itu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi juga akan semakin sulit untuk diselesaikan.

Penting bagi pemerintah untuk merombak pendekatan kebijakan publik dengan menjadikan riset, data, dan konsultasi masyarakat sebagai landasan utama dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa hal ini, kita akan terus terjebak dalam pola yang berulang: kebijakan yang tidak berhasil, keributan di masyarakat, dan munculnya “pahlawan” sesaat yang malah merusak kualitas demokrasi di negara ini. (Jihan Adila Rahmi, 2025)

## **KESIMPULAN**

Kelangkaan gas elpiji 3kg yang terjadi pada awal tahun 2025 tidak semata-mata mencerminkan persoalan distribusi, tetapi juga mengindikasikan adanya potensi dimensi politik dalam pelaksanaan kebijakan publik. Kebijakan untuk pelarangan penjualan gas elpiji 3kg di tingkat pengecer serta pembatasan distribusi hanya melalui pangkalan resmi dengan

pencatatan NIK memang bertujuan untuk menyalurkan subsidi secara tepat sasaran. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM yang sangat tergantung pada ketersediaan gas bersubsidi tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kondisi pasokan yang dinyatakan aman oleh pemerintah tidak sejalan dengan kenyataan di masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh gas. Hal ini juga menunjukkan adanya kesenjangan kelemahan dalam sistem pengawasan distribusi, kemungkinan praktik penimbunan oleh pihak-pihak tertentu, serta kurangnya kajian mendalam dalam penyusunan kebijakan. Munculnya dugaan adanya agenda politik di balik kebijakan ini semakin menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari para pengambil kebijakan.

Dampak dari kelangkaan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial dan politik. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan distribusi gas elpiji 3 kg, perbaikan sistem pengawasan, peningkatan komunikasi publik, serta pendekatan yang lebih partisipatif dalam proses perumusan kebijakan. Langkah-langkah ini penting agar krisis atau kelangkaan serupa dapat tercegah di masa yang akan datang dan prinsip keadilan sosial dapat terwujud secara nyata.

## Referensi

- Agustin, E. S. A. S., Irhamna, A. D., Rachbini, E. M., Abdulah, R., & Sumarto, A. H. (2022). *Kajian Tengah Tahun INDEF 2022: Reformulasi kemandirian ekonomi di tengah dinamika global*. INDEF.
- Akmal, R. (2025). *Keterjangkauan Petani Terhadap Pupuk Subsidi Di Kecamatan Kuta Malaka Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Dan Konsep Tas'ir Al-Jabari*.
- Ayuni, N. (2024). *Penimbunan Barang Dagangan Yang Tidak Memiliki Kadar Waktu (Daluarsa) Menurut Hukum Kebendaan Dalam Transaksi Perdagangan (Studi Terhadap Kasus Agen Pangkalan Distributor Gas Lpg Liquefied Petroleum Gas Kota Banda Aceh)*.
- Hidayat, H., Haba, J., & Siburian, R. (2011). *Politik ekologi: Pengelolaan taman nasional era Otda*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- KHAIRUNNISA, F., & Rosidah, Z. N. (2023). *TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK SECARA ECERAN DI KOTA SURAKARTA*.
- Kurniawan, M. I. (2013). *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam*

- Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.*
- LAMBANG, F. A. (t.t.). *MODAL SOSIAL DALAM MEMBANGUN BISNIS USAHA LONTONG.*
- Latif, A. (2015). Dampak Fluktuasi Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Suplai Sembilan bahan Pokok di pasar Tradisional. *Al-Buhuts*, 11(1), 91–116.
- Maulidia, R. (2025). *Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kg Bagi Distributor LPG 3 Kg Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh).*
- Mukhalladun, W. (2022). *Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji Subsidi 3 Kg di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur.*
- Putra, A. I., Sahl, D. F., Zou, G. C., & Makarim, N. R. (2024). *Bumi yang Terakhir*. Basya Media Utama.
- Rahmadian, I., Mustaghfiroh, S., & Firmansyah, F. (2025). The Strategy Of The Metro City Government In Improving The Effectiveness Of Subsidized LPG Distribution: Challenges, Solutions, And Innovations. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 87–96.
- Sirait, J. E., & Leorince, L. (2024). *Institusi Pendidikan Kristen Sebagai Pilar Kemerdekaan Pendidikan Di Indonesia. Diegesis: Jurnal Teologi*, 9(2), 207–231.
- Umam, A. K., Mayasari, I., Wijanarko, A. A., Radhiansyah, E., Annas, F. B., Siraj, F. M., Idris, H. R., Chrisharyanto, H., Hendrowati, R., & Idris, I. K. (2020). *Tantangan Integritas Bisnis Tambang di Indonesia*. Universitas Paramadina.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 79–92.
- Intyas, D., Putri, A., & Nugroho, R. (2022).** *Efektivitas Distribusi LPG 3 Kg Bersubsidi dan Dampaknya terhadap Masyarakat Miskin*. Jurnal Kebijakan Publik, 15(1), 45-60.
- Yuliani, T. (2021).** *Politik Subsidi Energi di Indonesia: Studi Kasus LPG 3 Kg*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(3), 205-223.
- Kementerian ESDM (2025).** *Siaran Pers dan Dokumen Kebijakan terkait Distribusi Elpiji 3kg per Februari 2025.*
- Fakih, M. (2002).** *Analisis Sosial Politik*. Yogyakarta: Insist Press.
- Pradiptyo, R., et al. (2015). *The Social and Fiscal Impact of Energy Subsidy Reform in Indonesia*. Energy Watch Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Tata Kelola Energi Indonesia 2022–2023.*

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). *Indonesia: The Political Economy of Democratic Inequality*. NUS Press.

Wahyuni, E. (2021). *Dampak Sosial Ekonomi Krisis Energi terhadap Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 12(3), 114-127.

LP EM FEB UI. (2022). *Evaluasi Efektivitas Distribusi LPG 3kg di Indonesia*.

Nurrahmi, R., & Siregar, R. (2022). *Analisis Kebijakan Pembatasan Distribusi LPG 3kg di Indonesia: Studi Kasus di Pulau Jawa dan Sumatera*. Jurnal Administrasi Publik, 19(2), 87–102.

<https://www.its.ac.id/news/2025/02/10/gas-melon-kembali-langka-masalah-subsidi-atau-tata-kelola/?HarriRadityaArdiantoDepartemenTeknikInstrumentasiAngkatan2024ReporterITSONline>

<https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/02/04/062600988/kelangkaan-elpiji-3-kg-dan-bbm-di-indonesia-pakar-ungkap-penyebabnya>

<https://emedia.dpr.go.id/2025/02/04/banggar-dpr-alokasi-anggaran-subsidi-lpg-2025-sangat-mencukupi/>

<https://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/polemik-kebijakan-baru-lpg-3-kg-ini-tanggapan-peneliti-senior-pusekra-ugm-fahmy-radhi/>

<https://mpr.go.id/berita/Kelangkaan-Gas-Elpiji-3-Kg%253A-Kebijakan-Tergesa-gesa-yang-Mengorbankan-Rakyat-Kecil?>

<https://ekspresionline.com/krisis-lpg-3-kg-polemik-oleh-kementerian-esdm-di-awal-2025/>

<https://omong-omong.com/kelangkaan-gas-lpg-3-kg-dan-politik-pahlawan/>

<https://www.metrotvnews.com/read/NxGCGqdB-pemerintah-diminta-segera-turun-tangan-atasi-sengkarut-elpiji-3-kg>

[https://umj.ac.id/just\\_info/kelangkaan-lpg-3-kg-pengecer-tak-menjual-warga-terbengkalai/](https://umj.ac.id/just_info/kelangkaan-lpg-3-kg-pengecer-tak-menjual-warga-terbengkalai/)

<https://money.kompas.com/read/2025/02/04/125929526/pro-dan-kontra-kebijakan-penjualan-elpiji-3-kg>